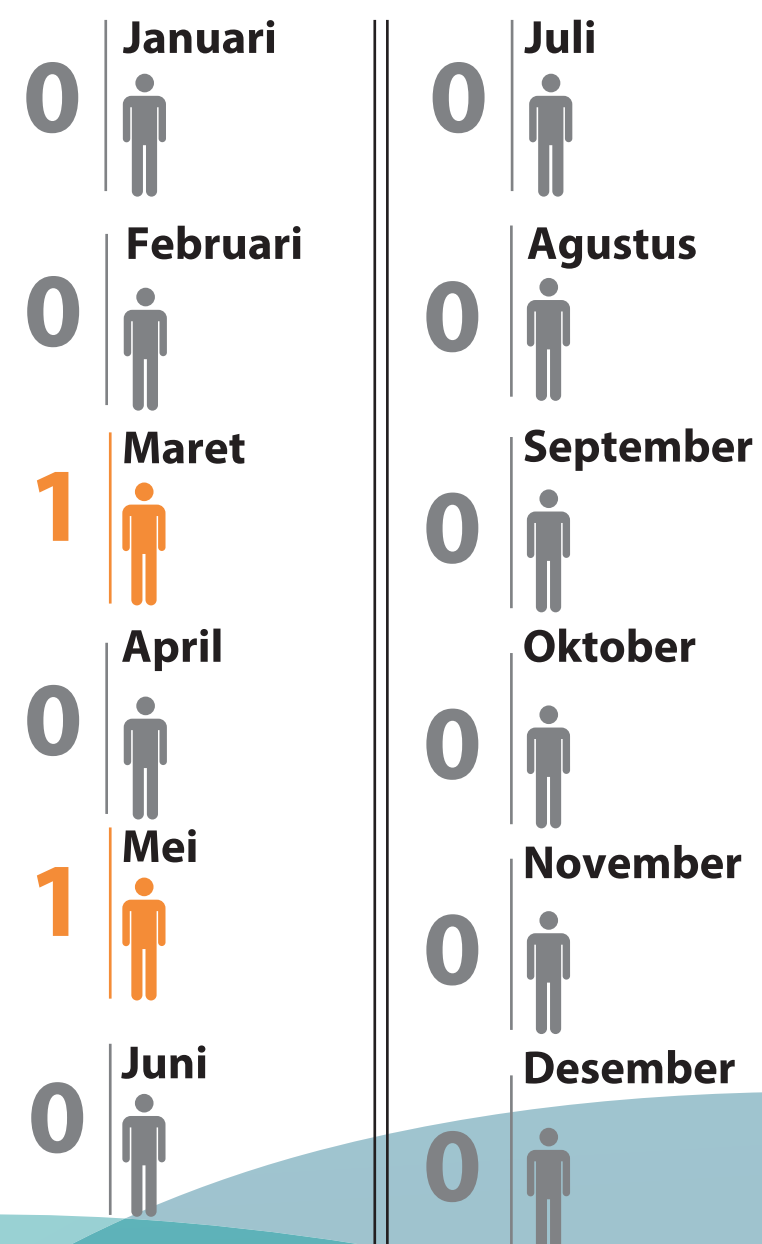


LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2022

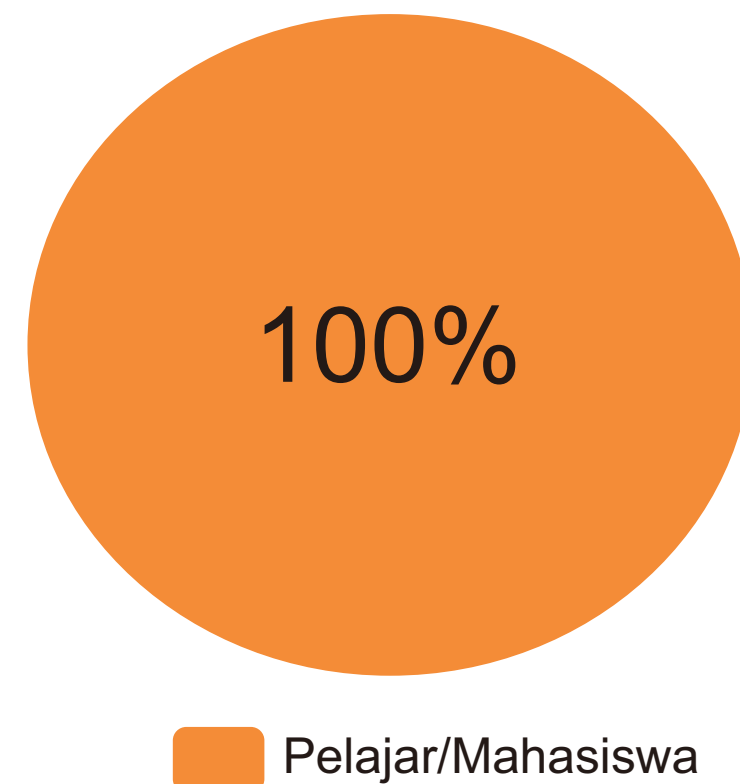
I. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, PPID Balai Besar POM di Banjarmasin telah menerima 2 (dua) permohonan informasi publik yang berasal dari pelajar/mahasiswa, dengan tujuan permohonan informasi untuk keperluan penelitian dan data dukung melengkapi referensi kuliah.

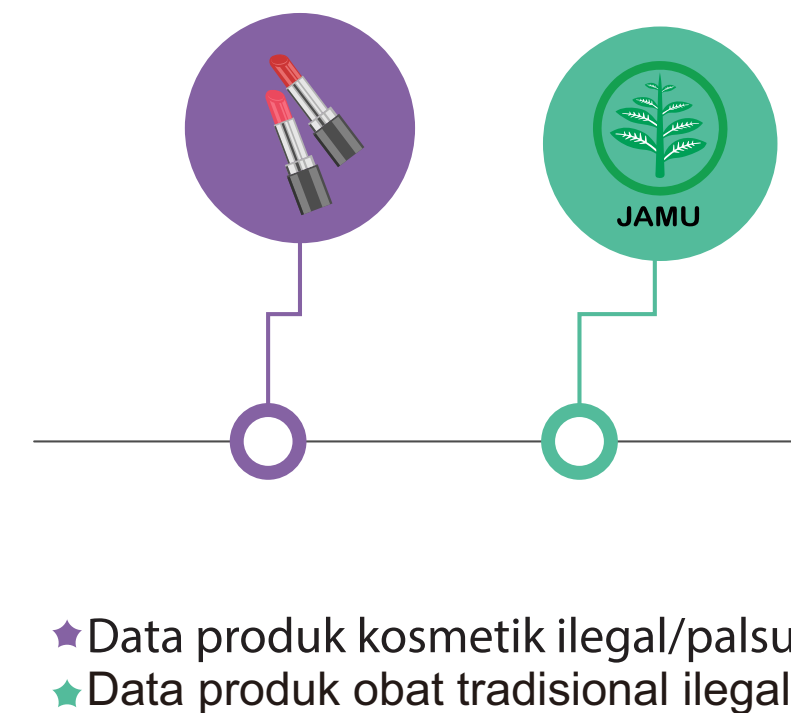
Permohonan Informasi Publik



Profil Pemohon Informasi Publik



Topik Informasi yang Dimohonkan



Tujuan Permohonan Informasi Publik

- Keperluan penelitian
- Sebagai referensi kuliah

II. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Service Level Agreement (SLA) Layanan Informasi Publik PPID

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang hingga 7 (tujuh) hari kerja.

Waktu layanan informasi publik

Pemenuhan *SLA* layanan Informasi

Rata-rata waktu pelayanan
10 hari kerja



III. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Badan Publik dapat menolak permohonan informasi publik dengan alasan :

I. Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik;

II. Informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan, yaitu

a) Informasi publik bila dibuka dan diberikan dapat

- ★ Menghambat proses penegakan hukum;
- ★ Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- ★ Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- ★ Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- ★ Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- ★ Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- ★ Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- ★ Mengungkapkan rahasia pribadi.

b) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

c) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik

